

## STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM RAYA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM RAYA SERENTAK DI FIS UNESA TAHUN 2015

**Lensi Megah Retta**

11040254045 (PPKn, FISH, UNESA) lensimegah@gmail.com

**Agus Satmoko Adi**

0016087208 (PPKn, FISH, UNESA) agussatmoko@unesa.ac.id

### Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan strategi apa saja yang digunakan oleh Komisi Pemilihan Umum Raya (KPUR) Ormawa FIS Unesa dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Raya (Pemira) Ormawa FIS Unesa secara serentak tahun 2015 sehingga dapat berjalan lancar dan sukses. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif karena tidak untuk menguji suatu hipotesis tetapi hanya menggambarkan dan mendeskripsikan hasil penelitian. Informan penelitian adalah anggota KPUR FIS Unesa tahun 2015 dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Pengambilan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Wawancara didasarkan pada instrumen penelitian yaitu pedoman wawancara. Setelah data terkumpul, kemudian diolah dengan mereduksi data, menyajikan data, kemudian menarik kesimpulan hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 4 (empat) strategi yang digunakan oleh KPUR dalam penyelenggaraan Pemira FIS secara serentak tahun 2015. Strategi-strategi yang digunakan diantaranya adalah : (1) ketetapan-ketetapan pemira; (2) memperketat keamanan selama pemira berlangsung; (3) pengamanan ekstra terhadap kotak suara; dan (4) penghitungan suara secara terbatas. Strategi tersebut menunjukkan bahwa KPUR FIS Unesa menggunakan model strategi protektif dari Wechsler dan Backoff (W-B) karena kapasitas organisasi KPUR terbatas yaitu pada jumlah dan waktu penyelenggaraan Pemira. Berdasarkan model Rubin, strategi yang digunakan KPUR FIS merupakan strategi venture (SV) karena terdapat dimensi waktu pendek dimana KPUR memiliki waktu singkat untuk mempersiapkan Pemira.

**Kata Kunci:** Strategi KPUR, penyelenggaraan Pemira.

### Abstract

The purpose of this research is to describes strategy whatever which used by general election commission highway student organization Faculty of Social Science, The State University of Surabaya, in the general election highway student organization Faculty of Social Science The State University of Surabaya simultaneously at 2015 so that it can be run well. The research methodology used is a qualitative method because it do not to test a hypothesis but only visualizes and describes the results of the study. Informants research is a member of general election commission highway student organization Faculty of Social Science The State University of Surabaya at 2015 by using a technique *purposive sampling*. The data is taken through interview and documentation. Interview is based on research instruments, that is interview guidelines. After data are collected, then processed by reduce the data, provide the data, then take the conclusions of the results study. The research results show that there are 4 (four) strategy that used by general election commission highway in the general elections highway student organization Faculty of Social Science simultaneously at 2015. The strategies are: (1) the statutes of general election highway; (2) impose security during the election take place; (3) extra security against a ballot box; and (4) vote counting limitedly. The strategies show that the general election commission highway student organization Faculty of Social Science use the model protective strategy of Wechsler and Backoff (W-B) because the general election commission highway organizational capacity is limited, namely on the quantity and the operating time the elections highway. Based on Rubin model, the strategy that used by general election commission highway student organization Faculty of Social Science is strategy venture (SV) because there are short time dimensions where the general election commission highway have a short time to prepare the elections highway.

**Keywords:** Strategy of the general election commission highway, holding of the election highway.

### PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang menerapkan sistem demokrasi. Demokrasi yang dimaksud adalah

kedaulatan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat, sehingga kekuasaan tertinggi pada suatu negara berada ditangan rakyat, seperti yang tercantum dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI)

Tahun 1945. Demokrasi dapat juga dikatakan sebagai pemerintahan dari bawah, maksudnya adalah sebagian besar rakyat atau mayoritas mempunyai suara untuk ikut dalam menentukan dan mempengaruhi proses perumusan kebijakan pemerintah melalui saluran-saluran yang ada, seperti partai politik, kelompok kepentingan, maupun pendapat umum.

Demokrasi adalah pandangan hidup atau gagasan yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuannya yang sama bagi semua warga negara (KBBI, 1989:195). Oleh sebab itu, manusia dalam menjalankan hidup dan kehidupannya dapat serasi, selaras, dan seimbang. Persamaan hak dan kewajiban yang dimaksud adalah adanya kesetaraan antara rakyat dengan para elit politik dalam berbagai bidang agar tidak terjadi kesenjangan sosial seperti hukum tumpul ke atas namun tajam ke bawah. Dalam sistem demokrasi sejatinya kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat seperti yang tercantum pada UUD NRI Tahun 1945.

Adanya sistem demokrasi telah membuat sejarah baru dalam pergantian pemerintahan di Indonesia. Pemilihan presiden, wakil presiden, DPR dan kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat setiap 5 (lima) tahun sekali, yang dikenal dengan "pesta rakyat". Sebagai konsekuensi dari negara demokrasi, Indonesia menerapkan sistem pemilihan umum (Pemilu) dalam kegiatan penyelenggaraan negara guna memilih pemimpin dan wakil rakyat secara langsung sesuai pilihannya. Hal ini bertujuan agar rakyat dapat menyampaikan aspirasinya kepada para elite politik yang dipilihnya dan untuk menghapuskan sistem pemerintahan otoriter seperti rezim terdahulu.

Pemilihan umum tidak hanya pada penyelenggaraan negara untuk memilih pemimpin dan wakil rakyat atau calon eksekutif dan legislatif saja, dalam dunia kampus juga terdapat badan eksekutif dan legislatif. Badan eksekutif di lingkup kampus disebut sebagai Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan badan legislatifnya disebut dengan Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) yang dulunya adalah Dewan Legislatif Mahasiswa (DLM). Pemilihan ketua dan wakil ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) dilakukan melalui pemilihan umum yang biasa dikenal dengan Pemilihan Umum Raya (Pemira).

Pelaksanaan Pemira dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali baik tingkat Jurusan/Prodi, Fakultas, dan Universitas. Sebagaimana halnya dengan Pemilu pada suatu negara, Pemira dilaksanakan oleh lembaga/organisasi inpedenden sebagai penyelenggaranya, yaitu Komisi Pemilihan Umum Raya (KPUR). KPUR merupakan organisasi yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Pemira. KPUR dibentuk

oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan ditinjau oleh Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) dengan melalui beberapa tahap seleksi.

Pemira yang merupakan pesta demokrasi mahasiswa baik tingkat prodi/jurusan, fakultas, dan universitas dilaksanakan seperti halnya pemilihan umum yang ada di Indonesia. Pemira merupakan miniatur dari pemilihan umum di lingkup kampus. Oleh karena itu, prosedur, teknis pelaksanaan, dan situasi pemilihan hampir sama dengan apa yang ada pada pemilihan umum, yang membedakan adalah ruang lingkupnya.

Pemilihan umum ruang lingkupnya lebih luas yaitu mencakup seluruh masyarakat yang ada di negara Indonesia. Namun, pemilihan umum raya ruang lingkupnya lebih kecil yaitu hanya mencakup mahasiswa di suatu universitas sehingga dapat dikatakan Pemira merupakan simulasi Pemilu. Meskipun demikian dan ruang lingkup Pemira kecil, tidak menutup kemungkinan terjadinya permasalahan bahkan kericuhan selama kegiatan pemilihan berlangsung.

Universitas Negeri Surabaya (Unesa) merupakan salah satu universitas yang kegiatan Pemiranya berjalan dinamis, artinya terdapat perubahan dalam pelaksanaannya sehingga tidak serta merta berjalan lancar dari awal hingga akhir. Hal ini disebabkan adanya berbagai macam golongan atau kelompok mahasiswa yang ingin ikut andil dalam Pemira sesuai idealisnya masing-masing. Pemira di Unesa baik tingkat prodi/jurusan, fakultas, dan universitas tidak berlangsung secara bersama/serentak melainkan terdapat jangka waktu yang berdekatan satu sama lain.

Berdasarkan pengamatan sejak tahun 2012 sampai 2015, terdapat dinamika dalam pelaksanaan Pemira di Unesa. Pada tahun 2012, Pemira tingkat Universitas berjalan lancar mulai dari awal perencanaan hingga akhir rekapitulasi suara. Tahun 2013 tidak sesuai yang diharapkan, pasca pencoblosan selesai terjadi kericuhan antar pendukung dari masing-masing calon. Begitu halnya pada 2014, kericuhan terjadi lagi bahkan sebelum pemilihan dimulai yang akhirnya membuat BEM-Unesa tidak aktif (vakum). Tahun 2015 tidak ada kericuhan karena tidak ada Pemira akibat dari vakumnya BEM-Unesa sebelumnya.

Dalam lingkup Fakultas maupun prodi juga tidak berbeda jauh dengan keadaan Pemira di tingkat Universitas. Pemira di setiap Fakultas maupun prodi memiliki karakteristik sendiri dalam pelaksanaannya. Karakteristik yang dimaksud adalah cara bermain mahasiswa untuk berpartisipasi di dalam pesta demokrasi. Meskipun lingkupnya lebih kecil, tidak menutup kemungkinan tingkat kekacauan yang ada juga kecil. Ada beberapa fakultas ketika Pemira terjadi kericuhan yang mengakibatkan terganggunya jalannya

pemilihan tidak sesuai dengan jadwal bahkan menyebabkan organisasi mahasiswa tidak aktif.

Setiap Pemira dari 7 Fakultas dan berbagai macam Prodi di UNESA, ada satu yang menjadi sorotan mahasiswa-mahasiswa yaitu Pemira di FIS. Pemira FIS dikenal ramai oleh mahasiswa-mahasiswa dari Fakultas lain. Selama 5 tahun terakhir penyelenggaraan Pemira di FIS berjalan ricuh, kecuali pada Pemira 2015. Berikut tabel yang menjelaskan tentang pelaksanaan Pemira di FIS dari tahun 2011 sampai 2015.

Tabel 1.1 Pelaksanaan Pemira di FIS Tahun 2011 – 2015

No.	Tahun	Sistem Pelaksanaan	Keterangan
1	2011	Tidak serentak (Pemira Fakultas dan Jurusan dilaksanakan dalam waktu berbeda)	Terjadi keriuhan (adanya selisih paham terkait hasil pemungutan suara)
2	2012	Tidak serentak (Pemira Fakultas dan Jurusan dilaksanakan dalam waktu berbeda)	Terjadi keriuhan (adanya calon tunggal dan tidak ada transparansi dari KPUR)
3	2013	Tidak serentak (Pemira Fakultas dan Jurusan dilaksanakan dalam waktu berbeda)	Terjadi keriuhan (adanya benturan antara KPUR dan bakal calon yang membuat BEM FIS vakum)
4	2014	Tidak serentak (Pemira Fakultas dan Jurusan dilaksanakan dalam waktu berbeda)	Terjadi keriuhan (hasil rekapitulasi suara tidak diterima oleh salah satu pendukung calon ketua BEM FIS)
5	2015	Serentak (Pemira Fakultas dan Jurusan dilaksanakan dalam waktu yang bersamaan)	Berjalan lancar dan tertib

Berdasarkan pada Tabel 1.1 pelaksanaan Pemira di FIS dari 5 tahun terakhir, diketahui bahwa pada tahun 2011 sampai 2014 Pemira dilaksanakan secara berkala, artinya pelaksanaan antara Pemira tingkat Fakultas dan jurusan di FIS tidak dalam waktu bersamaan atau secara terpisah. Namun, pada tahun 2015 Pemira FIS Unesa baik tingkat fakultas maupun jurusan dilaksanakan secara serentak dan dalam waktu yang bersamaan.

Pada tahun 2011 terjadi aksi protes terhadap hasil penghitungan suara. Pada tahun 2012 terjadi keriuhan dalam pendaftaran bakal calon yang menyebabkan adanya calon tunggal. Tahun 2013 juga terjadi keriuhan lagi yang menyebabkan mahasiswa melakukan aksi untuk menuntut penjejalan bakal calon hingga membuat BEM-FIS tidak aktif (vakum). Tahun 2014 merupakan

keriuhan yang besar dibanding tahun sebelumnya karena menyebabkan korban luka. Kronologisnya ketika penghitungan ulang surat suara belum selesai, terjadi aksi pelemparan dari salah satu pendukung yang kemudian berimbas pada kekerasan fisik hingga menyebabkan korban luka.

Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, Pemira FIS tahun 2015 berjalan lancar tanpa adanya keributan bahkan kekerasan. Selain itu, Pemira FIS tahun 2015 dilakukan secara serentak, artinya baik tingkat Fakultas maupun jurusan/prodi pemilihan dilaksanakan pada waktu yang sama. Pilihan serentak dalam penyelenggaraan Pemira didasarkan pada beberapa alasan. Pernyataan narasumber yang merupakan salah satu anggota KPUR FIS, yaitu Hanif terkait alasan dari pelaksanaan Pemira secara serentak adalah sebagai berikut:

Alasan dari segi efisiensi waktu adalah pemira serentak dapat mempersingkat waktu karena pemilihan BEM, DPM maupun HMJ/HMP dilakukan di waktu dan hari yang sama. Dari segi anggaran, pemira serentak dapat meminimalisir anggaran. Dengan pemira serentak kemungkinan besar tingkat keriuhan akan menurun sehingga dapat mengurangi terjadinya konflik. (wawancara 6 Juni 2016)

Berdasarkan pernyataan Hanif di atas, dapat disimpulkan bahwa alasan pelaksanaan Pemira FIS tahun 2015 secara serentak adalah untuk efisiensi waktu, meminimalisir anggaran dan mengurangi konflik. Efisiensi waktu dimaksudkan untuk mempersingkat waktu pemilihan baik BEM/DPM maupun HMJ/HMP karena dilakukan di hari yang sama. Tujuannya agar tidak mengganggu kegiatan perkuliahan mahasiswa FIS.

Dalam hal meminimalisir anggaran dana, tujuannya adalah agar biaya yang dikeluarkan untuk kebutuhan Pemira tidak terlalu banyak seperti pada Pemira terpisah. Selain itu, pemira serentak dapat mengurangi terjadinya konflik karena keamanannya lebih terakomodir dan fokus masing-masing pendukung akan terpecah. Dengan demikian, dalam waktu yang bersamaan fokus para pendukung masing-masing calon baik tingkat jurusan maupun fakultas akan terpecah.

Adanya Pemira FIS secara serentak juga telah diatur dalam Peraturan FIS Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Umum Raya Organisasi Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Surabaya Tahun 2015 pasal 2 ayat 1 yang berbunyi:

Pemilu Raya Fakultas Ilmu Sosial Unesa dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali pada hari aktif kuliah di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Surabaya secara serentak.

Pemira serentak memiliki cakupan yang lebih luas dan kendala dalam pelaksanaan semakin kompleks, bahkan kemungkinan konflik yang ditimbulkan juga lebih besar. Namun, berdasarkan pengamatan kegiatan Pemira FIS tahun 2015 yang dilaksanakan secara serentak berjalan lancar tanpa adanya keributan seperti tahun-tahun sebelumnya.

Kelancaran Pemira FIS tahun 2015 tidak luput dari adanya strategi-strategi yang dilakukan oleh KPUR dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Raya. Oleh karena itu, rumusan dari penelitian ini adalah bagaimana strategi Komisi Pemilihan Umum Raya (KPUR) Ormawa FIS Unesa dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Raya (Pemira) Ormawa FIS Unesa secara serentak tahun 2015. Tujuan dari penelitian adalah untuk mendeskripsikan strategi apa saja yang digunakan oleh KPUR Ormawa FIS Unesa dalam penyelenggaraan Pemira Ormawa FIS Unesa secara serentak tahun 2015 agar tidak terjadi keributan.

Berkaitan dengan strategi, istilah strategi berasal dari kata *Strategos* dalam bahasa Yunani yang berarti *stratos* (tentara) dan *ego* (pemimpin). Strategi biasanya digunakan di lingkungan militer, yaitu sebagai “kiat” seorang pimpinan untuk memenangkan peperangan atau persaingan yang merupakan tujuan utama. Secara etimologis kata “strategi” diartikan sebagai kiat, cara dan taktik utama yang dirancang secara sistematis/urut dalam melaksanakan fungsi-fungsi manajemen, terarah pada tujuan organisasi.

Bryson (dalam Kurniawan, 2009:82), strategi adalah salah satu cara untuk membantu organisasi mengatasi lingkungan yang selalu berubah serta membantu organisasi untuk memecahkan masalah terpenting yang mereka hadapi. Oleh karena itu, melalui strategi organisasi dapat membangun kekuatan dan memecahkan masalah serta mengambil keuntungan dari peluang, mengatasi kelemahan dan ancaman dari luar.

Melalui organisasi diharapkan dapat membuat keputusan sekarang dengan memprediksikan dan melihat konsekuensi-konsekuensi di masa depan. Konsekuensi tersebut diantaranya adalah menangani keadaan yang berubah cepat dan menciptakan prioritas dalam memecahkan suatu masalah. Di dalam organisasi, pengambilan keputusan sangat diperlukan demi terwujudnya tujuan awal dan kelancaran organisasi.

Berdasarkan pengertian di atas, strategi adalah suatu cara atau taktik yang digunakan oleh organisasi untuk mencapai tujuannya secara konsisten dan untuk mengatasi masalah dalam lingkungan yang sewaktu-waktu dapat berubah. Strategi KPUR sendiri adalah cara untuk mencapai tujuan organisasi dan mengantisipasi kemungkinan terjadinya konflik akibat beberapa faktor dari lingkungan sekitar.

Menurut Wechsler dan Backoff (model W-B) terdapat 4 (empat) jenis strategi, diantaranya strategi pengembangan, transformasi, protektif, dan politik. Strategi pengembangan yaitu strategi yang digunakan untuk berusaha menciptakan masa depan baru yang lebih baik. Strategi transformasi dipengaruhi oleh kekuatan dan lingkungan di luar organisasi. Strategi protektif terbentuk karena adanya potensi ancaman yang berasal dari lingkungan luar organisasi dan di saat yang sama kapasitas organisasi yang dimiliki terbatas. Strategi politik ditujukan untuk melakukan akomodasi dan menjaga keseimbangan kekuasaan yang berasal dari luar organisasi (Bryson, 1995:280(dalam Muhammad, 2012:86)).

Sedangkan menurut Rubin jenis-jenis strategi meliputi strategi *saga*, *venture*, *quest*, dan *parlay*. Strategi *saga* merupakan strategi yang menggunakan masa lalu sebagai dasar rancang bangunnya. Strategi *venture* adalah strategi untuk menjelaskan orientasi strategi yang memiliki dimensi waktu pendek. Strategi *quest* digunakan untuk menjelaskan strategi yang memiliki orientasi waktu ke masa depan yang merupakan ciri khas strategi interaktif. Strategi *parlay* digunakan untuk menggambarkan pilihan ketika organisasi berada pada lingkungan yang memiliki tingkat turbulensi ekstrim.

Pemilihan umum raya atau lebih dikenal dengan sebutan “Pemira” adalah suatu sarana pemilihan umum oleh mahasiswa dalam lingkup universitas. Jika Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat, maka Pemira dapat dikatakan sebagai sarana kedaulatan mahasiswa. Hal ini karena mahasiswa berarti rakyat di dalam suatu universitas. Secara umum, Pemira adalah kegiatan untuk memilih ketua dan wakil ketua dalam suatu organisasi intra di dalam kampus seperti badan eksekutif dan legislatif, baik tingkat program studi (*prodi*), jurusan, fakultas, maupun universitas.

Organisasi intra yang dimaksud adalah Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM), dan Himpunan Mahasiswa Jurusan/Prodi (HMJ/P). Pemira diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum raya yang bersifat sementara (*ad hock*) (MA-U XVI ORMAWA Unesa, 2013:33). Pemira diselenggarakan setiap 1 (satu) tahun sekali pada saat hari aktif kuliah.

Berdasarkan MA-U XVI ORMAWA Unesa pasal 38 dijelaskan bahwa Pemilihan Umum Raya Republik Mahasiswa Universitas Negeri Surabaya diselenggarakan untuk memilih anggota Majelis Permusyawaratan Mahasiswa, Presiden dan Wakil Presiden BEM. Pemilihan Umum Raya Organisasi Kemahasiswaan Fakultas diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas, Ketua dan Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas. Pemilihan Umum Raya Organisasi Kemahasiswaan Jurusan/Prodi

diselenggarakan untuk memilih Ka-Hima dan Wakil Ka-Hima Jurusan/Prodi.

Selanjutnya, Pemilihan Umum Raya Organisasi Kemahasiswaan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Surabaya adalah sarana pelaksanaan kedaulatan mahasiswa dalam kampus yang disebut Pemilu Raya Ormawa FIS Unesa. Pemilu Raya Ormawa FIS Unesa dilaksanakan untuk memilih Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) FIS, ketua-wakil ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) FIS, dan ketua-wakil ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan/Prodi (HMJ/HMP) se-FIS.

Dalam Pemilu Raya Ormawa FIS Unesa diselenggarakan serentak secara demokratis dan transparan, jujur dan adil, dengan melakukan pemungutan suara secara langsung, umum, bebas, dan rahasia. Pemilu Raya Ormawa FIS Unesa untuk anggota DPM FIS Unesa dilaksanakan dengan menggunakan sistem proporsional atau keterwakilan berdasarkan Prodi masing-masing.

Pemira diselenggarakan oleh suatu lembaga yaitu Komisi Pemilihan Umum Raya. Komisi Pemilihan Umum Raya atau lebih dikenal dengan sebutan KPUR merupakan suatu lembaga independen yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemilihan umum raya. Komisi pemilihan umum raya bersifat sementara (*ad hoc*), sehingga keberadaan KPUR tidak berlangsung lama melainkan hanya pada saat akan diadakan Pemira sampai selesai. Dengan demikian terbentuknya KPUR hanya setiap tahun sekali selama beberapa minggu.

Dalam tingkat fakultas, komisi pemilihan umum raya atau KPUR Ormawa FIS bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemilu raya Ormawa FIS yang bersifat independen. Selanjutnya, komisi pemilihan umum raya Ormawa Jurusan dan/atau Prodi (KPUR-J/P) bertanggung jawab atas penyelenggaraan Pemilu Raya Ormawa FIS Unesa ditingkat Jurusan dan/atau Prodi yang juga bersifat independen.

Pembentukan KPUR Ormawa FIS Unesa ditetapkan dengan keputusan Ketua BEM FIS Unesa dan atas pantauan dari DPM FIS Unesa. Keanggotaan KPUR Ormawa FIS Unesa terdiri dari 1 (satu) orang wakil ditiap Jurusan dan/atau Prodi yang dipilih oleh BEM FIS Unesa melalui *Open Recruitment* dengan mempertimbangkan hasil dari *fit and proper test*. Hal ini merupakan syarat umum dalam suatu organisasi.

Organisasi merupakan sesuatu yang bersifat abstrak namun dapat dirasakan keberadaannya, baik oleh anggota organisasi maupun masyarakat luar. Menurut Thompson (dalam Rais, 1994:1), organisasi adalah suatu integrasi dan sejumlah spesialis-spesialis yang bekerja sama dengan rasional dan impersonal untuk mencapai beberapa tujuan spesifik yang telah diumumkan sebelumnya.

Sedangkan menurut Chester I. Bernard (dalam Rais, 1994:2), organisasi adalah suatu sistem dari kegiatan-kegiatan yang terkoordinasikan secara sadar atau kekuatan-kekuatan yang terdiri dari dua orang atau lebih. Schein (1982)(dalam Muhammad, 1995:23) menjelaskan bahwa organisasi adalah suatu koordinasi rasional kegiatan sejumlah orang untuk mencapai beberapa tujuan umum melalui pembagian kerja dan fungsi melalui hierarki otoritas dan tanggung jawab.

Menurut Philips Selznik (dalam Muis, 2007:13), organisasi adalah suatu sistem yang dinamis, selalu berubah dan menyesuaikan diri dengan tekanan internal maupun eksternal, dan selalu dalam proses evolusi yang terus menerus. Sistem kerja sama yang dimiliki terdiri dari individu yang berinteraksi dalam suatu sistem koordinasi formal. Dengan demikian, struktur nyatanya adalah suatu totalitas dari organisme adaptif yang bereaksi terhadap pengaruh lingkungan eksternal.

Dalam sebuah organisasi terdapat seorang pemimpin yang dapat memimpin dan mengarahkan tujuan organisasi agar berjalan lancar dan efektif. Pemimpin memiliki andil besar dalam berlangsungnya kegiatan mulai dari perencanaan, pengaturan strategi sampai berakhirnya acara. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan dalam organisasi diperlukan perilaku organisasi.

Menurut Robbins (1986) (dalam Umar, 2009:3), perilaku organisasi adalah suatu bidang studi yang menyelidiki pengaruh yang ditimbulkan oleh individu, kelompok, dan struktur terhadap perilaku (manusia) di dalam organisasi dengan tujuan menerapkan pengetahuan yang didapat untuk meningkatkan efektivitas organisasi. Perilaku organisasi memiliki tujuan, diantaranya adalah sebagai prediksi, eksplanasi (penjelasan), dan pengendalian. Perilaku organisasi meliputi komunikasi organisasi dan pengambilan keputusan. Melalui komunikasi organisasi dapat terlihat bagaimana komunikasi diantara anggotanya yang secara umum menunjukkan gambaran perilaku suatu organisasi. Sedangkan melalui pengambilan keputusan menunjukkan bagaimana peran ketua dan cara yang digunakan dalam mengambil keputusan. Selain perilaku organisasi, di dalam suatu organisasi terdapat beberapa pendekatan-pendekatan yang digunakan.

Berdasarkan teori organisasi terdapat pendekatan yang digunakan untuk mengetahui perkembangan setiap organisasi. Pendekatan organisasi tersebut meliputi pendekatan klasik, tingkah laku, struktur, dan sistem. Pendekatan klasik atau lebih dikenal dengan pendekatan tradisional menekankan organisasi sebagai mesin yang setiap bagian-bagiannya dapat diganti dan mempunyai tugas tertentu sesuai fungsinya. Pendekatan klasik sangat memperhatikan pembagian kerja, spesialisasi dan

standard dalam mendesain organisasi agar dapat efektif dan efisien untuk mencapai tujuan.

Pendekatan tingkah laku merupakan kritik terhadap pendekatan klasik yang menganggap manusia seperti bagian mesin yang mudah diganti. Pendekatan tingkah laku menekankan pada pentingnya memperhitungkan aspek manusia secara utuh dalam mendesain suatu struktur organisasi. Bahan penelitian utama adalah tingkah laku manusia dalam organisasi untuk mengetahui faktor-faktor yang membentuk kerja sama antar manusia dalam mencapai tujuan organisasi. Pendekatan tingkah laku menekankan pada tingkat produktivitas yang dihasilkan oleh suatu organisasi sehingga lebih didasarkan pada ilmu pengetahuan dan teknologi.

Peter F. Drucker (dalam Hasibuan, 2007:81) mengemukakan tiga jalan untuk menemukan struktur yang membantu pencapaian tujuan, yaitu analisis kegiatan, analisis keputusan, dan analisis hubungan. Analisis kegiatan meliputi pekerjaan apa yang harus dilakukan di dalam struktur organisasi. Analisis keputusan adalah merancang suatu struktur organisasi dan juga segala hal yang berkaitan dengan keputusan yang harus dibuat. Melalui analisis keputusan dapat menentukan tingkat bobot keputusan yang akan diambil.

Analisis hubungan berkaitan dengan hubungan vertikal (atasan dengan bawahan) dan hubungan horizontal (hubungan sejajar). Tujuan penganalisisan hubungan adalah untuk membantu merumuskan struktur organisasi dan memberikan pedoman penempatan tenaga kerja dalam struktur. Dalam hal ini, melalui analisis hubungan dapat difokuskan tiap-tiap tanggung jawab pekerja sesuai dengan kedudukannya dalam struktur organisasi.

Menurut pendekatan sistem, organisasi merupakan suatu sistem terbuka yang harus berinteraksi dengan lingkungannya. Organisasi adalah suatu sistem terbuka karena interaksinya mencakup proses-proses bersifat hakiki untuk mempertahankan eksistensi, menopang fungsi serta menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Dalam sistem terbuka terdapat dua interaksi, yaitu interaksi internal dan eksternal. Interaksi internal adalah interaksi antara subsistem-subsistem/bagian-bagian yang ada di dalam organisasi tersebut. Sedangkan interaksi eksternal adalah interaksi antara suatu organisasi dengan pihak luar seperti perseorangan atau organisasi lain.

Berdasarkan penjelasan tentang beberapa pendekatan mulai dari pendekatan klasik hingga pendekatan sistem, KPUR fakultas merupakan organisasi dengan pendekatan sistem. Seperti halnya pendekatan sistem yang menekankan pada suatu interaksi, KPUR juga melakukan interaksi internal dan eksternal untuk memutuskan strategi atau cara yang digunakan agar tujuan awal dapat terwujud dengan lancar.

Interaksi internal yaitu dengan sesama pengurus dan anggota di dalam Komisi Pemilihan Umum Raya (KPUR) seperti dalam pelaksanaan rapat pleno atau ketika kegiatan Pemira berlangsung. Sedangkan interaksi eksternal adalah interaksi antara KPUR dengan pihak birokrasi kampus, pihak keamanan baik dari satpam maupun kepolisian, calon kandidat Pemira ataupun para pendukung masing-masing calon serta mahasiswa pemilih (mahasiswa FIS Unesa).

## **METODE**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian lebih menekankan pada makna (Sugiyono, 2014:1).

Lokasi penelitian merupakan tempat untuk melakukan penelitian. Dalam penelitian ini lokasi yang digunakan adalah lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum (FISH) Universitas Negeri Surabaya yang berada di daerah Ketintang. Waktu penelitian merupakan sederetan waktu yang digunakan selama kegiatan penelitian berlangsung. Lamanya waktu selama penelitian berlangsung adalah sekitar 1 (satu) bulan.

Informan adalah orang yang memberikan informasi (Arikunto, 2006:145). Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi dan menjawab pertanyaan-pertanyaan berdasarkan rumusan masalah dalam suatu penelitian. Pemilihan informan penelitian menggunakan teknik *purposive sampling*. Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, yaitu sumber yang dianggap paling mengetahui tentang apa yang diharapkan atau sebagai penguasa sehingga memudahkan peneliti menjelajahi objek yang diteliti (Sugiyono, 2014:54). Informan penelitian yang dimaksud pada penelitian ini adalah KPUR FIS Unesa Tahun 2015.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui wawancara dan dokumentasi. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan secara langsung dengan narasumber. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan ingin mengetahui hal-hal dari responden secara lebih mendalam (Sugiyono, 2014:72). Wawancara ditujukan kepada KPUR Ormawa FIS Unesa Tahun 2015. Sedangkan dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang (Sugiono, 2014:82). Dokumentasi yang

dimaksud disini berupa foto dan berkas-berkas/dokumen terkait adanya Pemira FIS Unesa Tahun 2015. Berkas-berkas dokumen meliputi hasil dari rapat pleno KPUR dan hasil rekapitulasi suara pada Pemira FIS UNESA Tahun 2015 yang digunakan untuk melengkapi data-data penelitian.

Teknik analisis data dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh (Miles and Huberman (1984) (dalam Sugiyono, 2014:91)). Aktivitas analisis data meliputi pengumpulan data, reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan verifikasi data atau penarikan kesimpulan. Selanjutnya instrumen penelitian menggunakan pedoman wawancara.

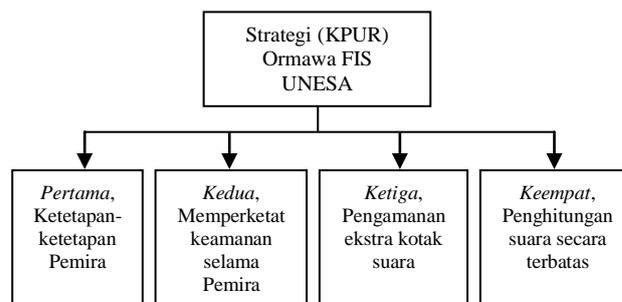
## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

Tema dari penelitian ini adalah sosial politik dengan judul “Strategi Komisi Pemilihan Umum Raya (KPUR) Ormawa FIS Unesa dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Raya (Pemira) Ormawa FIS Unesa secara serentak Tahun 2015” yang mana dalam Pemira diikuti dengan kepentingan politik mahasiswa. Strategi KPUR adalah cara atau taktik yang digunakan selama menyelenggarakan Pemira demi kelancaran dan kesuksesan Pemira. Strategi KPUR dalam penyelenggaraan Pemira difokuskan pada cara mengantisipasi terjadinya konflik karena adanya konflik dapat mengganggu kelancaran kegiatan.

Dari hasil penelitian telah diketahui terdapat beberapa strategi yang digunakan KPUR selama menyelenggarakan Pemira. Menurut Fajar selaku Ketua KPUR FIS Tahun 2015, waktu yang digunakan untuk menyiapkan segala sesuatu terkait Pemira FIS UNESA tahun 2015 terbatas, yaitu kurang lebih 1 (satu) minggu dari terbentuknya KPUR FIS UNESA Tahun 2015. Waktu selama kurang lebih 1 (satu) minggu merupakan waktu yang sangat singkat untuk mempersiapkan kegiatan Pemira. Oleh karena itu, diperlukan persiapan yang ekstra cepat dan matang terlebih untuk menentukan strategi-strategi yang digunakan selama Pemira berlangsung.

Dalam mempersiapkan agenda kegiatan, KPUR mengatur strategi-strategi untuk mensukseskan Pemira secara serentak. KPUR FIS UNESA Tahun 2015 bekerja ekstra keras untuk menyiapkan dan memikirkan strategi atau cara menuju Pemira FIS yang sukses karena hanya memiliki estimasi waktu 1 minggu. Dengan waktu yang singkat, KPUR merencanakan semua strategi dengan matang dan hati-hati dalam menyelenggarakan Pemira FIS tahun 2015. Dalam mempermudah pemahaman terkait strategi-strategi KPUR dapat digambarkan dalam bentuk bagan seperti berikut:



Bagan 1.1 Strategi KPUR FIS Unesa dalam penyelenggaraan Pemira FIS Unesa secara serentak Tahun 2015

Berdasarkan bagan 1.1 tentang strategi KPUR FIS Unesa dalam penyelenggaraan Pemira FIS Unesa secara serentak Tahun 2015 menunjukkan beberapa strategi yang digunakan oleh KPUR. Strategi-strategi tersebut meliputi: ketetapan-ketetapan Pemira, memperketat keamanan selama Pemira berlangsung, pengamanan ekstra terhadap kotak suara, dan penghitungan suara secara terbatas.

*Pertama*, ketetapan-ketetapan Pemira. Ketetapan-ketetapan dalam Pemira digunakan sebagai aturan yang harus ditaati dalam Pemira. Jadi, ketetapan-ketetapan dibuat agar tidak ada celah bagi pihak luar terutama timses dan para pendukung masing-masing calon untuk membuat ricuh Pemira. Dengan demikian ketetapan-ketetapan yang dibuat KPUR FIS merupakan strateginya untuk membuat Pemira berjalan lancar. Ketetapan berisi teknis pelaksanaan Pemira, yang dituturkan oleh saudara Fajar, sebagai berikut:

Ketetapan-ketepatan KPUR tentang teknis Pemira meliputi ketetapan persyaratan calon, ketetapan verifikasi calon, jumlah dapil tiap prodi/jurusan, tentang sosialisasi peraturan-peraturan KPUR FIS dan lain-lain. (wawancara 4 Juni 2016)

Ketetapan-ketetapan tersebut merupakan hasil dari rapat pleno KPUR FIS yang telah disepakati dan diputuskan oleh semua anggota. Hasil dari rapat pleno berkaitan erat dengan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh peserta rapat terutama Ketua KPUR FIS. Menurut Fajar sebagai ketua dari KPUR FIS berpendapat bahwa:

Ketetapan dilakukan secara musyawarah. Setiap pendapat didengarkan dengan baik-baik sehingga tidak sampai terjadi voting. Aturan dibuat dari awal berdasarkan gambaran umum pemilihan dari Ketua KPUR. (wawancara 4 Juni 2016)

Pembuatan ketetapan membutuhkan tindakan untuk memutuskan isi dari ketetapan itu sendiri. Pengambilan keputusan dalam membuat ketetapan dilakukan dengan cara musyawarah. Musyawarah diawali dengan bersama-sama membuat aturan dalam rapat pleno kemudian mendengarkan pendapat dari masing-masing anggota

KPUR. Pendapat tersebut disaring dan diambil ide yang terbaik melalui kesepakatan bersama sehingga tidak terjadi voting. Peran ketua disini tidak sebagai pemegang keputusan penuh melainkan memberi gambaran umum terkait Pemira untuk selanjutnya dimusyawarahkan bersama. Pernyataan lain yang dapat menguatkan uraian di atas adalah dari saudara Hanif yang menyatakan bahwa:

Pembentukan pengurus KPUR mulai dari ketua, sekretaris, bendahara dan anggota lainnya dilakukan secara musyawarah. Setiap permasalahan dapat ditengahi dengan adanya gagasan-gagasan terbaik di dalam forum melalui musyawarah dan disetujui oleh semua pihak. (wawancara 6 Juni 2016)

Kegiatan musyawarah tidak hanya dilakukan ketika rapat pleno pembuatan ketetapan saja, tetapi juga digunakan dalam pembentukan pengurus KPUR. Musyawarah dilakukan untuk membentuk Ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota lainnya sesuai *job description* atau bidangnya. Dengan demikian, pengambilan keputusan melalui musyawarah sudah dilakukan sejak awal dari terbentuknya KPUR. Semua pendapat dapat ditampung dan di atasi melalui musyawarah dengan mempertimbangkan dan memilih gagasan terbaik dalam forum berdasarkan kesepakatan bersama dan disetujui oleh semua pihak.

Selain pendapat yang sudah dipaparkan, terdapat pernyataan yang tidak jauh berbeda yaitu dari saudara Yusuf. Berikut pernyataannya:

Ada waktunya dilakukan musyawarah dan ada waktunya untuk voting, karena musyawarah juga berbeda pendapat yang mana harus ada solusinya pasca musyawarah sehingga perlu dilakukan voting. (wawancara 17 Juni 2016)

Pernyataan dari Yusuf sedikit berbeda dari pendapat kedua rekannya di atas. Menurutnya, selain musyawarah juga perlu dilakukan voting dalam pengambilan keputusan karena ada kalanya melalui musyawarah dan ada kalanya melakukan voting. Di dalam musyawarah terdapat perbedaan pendapat diantara para anggota dan jika tetap tidak ada titik temu maka solusinya adalah dengan cara voting. Voting digunakan untuk menghasilkan keputusan sesegera mungkin dengan mengambil suara terbanyak dari jumlah anggota yang hadir.

Berdasarkan pendapat-pendapat dari anggota KPUR FIS, dapat diketahui bahwasanya dalam pengambilan keputusan untuk membuat ketetapan-ketetapan Pemira dilakukan dengan musyawarah dan voting. Musyawarah dilakukan untuk mengetahui pendapat masing-masing anggota dan Ketua hanya menggambarkan seperti apa pemilu itu. Apabila dalam musyawarah tidak menemukan

titik temu, maka Ketua memutuskan untuk melakukan voting berdasar pada ide-ide terbaik dengan mengambil suara terbanyak dari jumlah anggota.

Ketetapan-ketetapan yang telah dibuat merupakan hasil dari pleno para anggota yang telah disepakati. Ketetapan tersebut digunakan sebagai acuan dalam bertindak selain UU No. 1 tentang Pemira dan peraturan lainnya. Hasil ketetapan tersebut dilaksanakan sebagaimana mestinya seperti yang dipaparkan oleh Ketua KPUR, Fajar. Fajar menyatakan bahwa:

Dalam melaksanakan ketetapan perlu berkoordinasi dengan panwaslu. KPUR melakukan sosialisasi agar semua bisa berkoordinasi dengan baik. Sosialisasi dilakukan kepada semua mahasiswa FIS terutama timsesnya. Secara teknis KPUR terbatas pada waktu yang hanya seminggu, sehingga sosialisasi terkait mekanisme pemira lebih ditekankan pada calon dan timsesnya. Sosialisasi yang dilakukan berupa teknikal meeting, poster dan pamflet yang ditempelkan di mading seluruh FIS. Sosialisasi berupa media massa melalui akun dari BEM FIS sebagai organisasi yang membentuk KPUR FIS.

Pernyataan Fajar menunjukkan bahwa hasil dari rapat pleno yang berupa ketetapan-ketetapan Pemira harus dilaksanakan oleh KPUR dan dalam pelaksanaannya KPUR berkoordinasi dengan Panwaslu. Kemudian setelah KPUR berkoordinasi dengan Panwaslu, dalam pelaksanaannya dilakukan sosialisasi ke seluruh mahasiswa FIS terutama pada timses masing-masing calon. Sosialisasi kepada pihak calon dan timsesnya berupa teknikal meeting. Teknikal meeting dilakukan untuk menyampaikan informasi terkait teknis Pemira secara langsung.

Sosialisasi lebih ditujukan pada calon dan timses masing-masing peserta melalui teknikal meeting. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari kesalahpahaman diantara kedua belah pihak. Kesalahpahaman dapat memicu timbulnya konflik dikemudian hari. Sosialisasi kepada seluruh mahasiswa FIS dilakukan melalui media massa yaitu elektronik dan cetak. Media elektronik meliputi media sosial online (facebook, twitter, bbm dan whatsapp) dengan akun milik BEM FIS dan salah 1 (satu) anggota KPUR FIS. Sedangkan media cetak meliputi pamflet, poster dan banner yang dipasang di tiap-tiap mading jurusan dan di depan gedung fakultas.

Strategi yang dilakukan KPUR dalam hal pembuatan ketetapan Pemira selain dari pengambilan keputusannya juga dari segi pelaksanaan. Ketetapan yang merupakan hasil dari musyawarah para anggota KPUR (rapat pleno) harus dilaksanakan. Pelaksanaannya harus berkoordinasi dengan Panwaslu dan kemudian disosialisasikan ke semua

pihak agar transparan dan mahasiswa FIS mengetahui agenda apa saja yang akan berlangsung menjelang Pemira. Dengan demikian dapat menghindari terjadinya konflik karena kurangnya informasi terkait teknis Pemira.

*Kedua*, memperketat keamanan selama Pemira berlangsung. Selama Pemira berlangsung merupakan waktu yang rawan terjadinya konflik dan keributan karena pihak-pihak yang ingin menghalangi jalannya Pemira biasanya melakukan berbagai cara untuk menggagalkan kegiatan, terutama pihak yang calonnya tidak begitu kuat. Oleh karena itu, diperlukan strategi untuk mengantisipasi adanya keributan. Seperti yang telah diketahui sebelumnya, pihak KPUR melakukan komunikasi dengan pihak luar yaitu satpam dan kepolisian bertujuan untuk mengawal jalannya Pemira. sebagaimana pernyataan dari saudara Fajar yang menyatakan bahwa:

Dari segi keamanan terdapat pihak satpam dan kepolisian untuk mengawal secara penuh jalannya pemira, mulai dari awal persiapan pembukaan Pemira sampai proses penghitungan suara selesai. (wawancara 4 Juni 2016)

Satpam dan kepolisian merupakan pihak yang berwenang dalam bidang keamanan karena tugas diantara keduanya adalah untuk mengamankan dan melindungi masyarakat dari tindakan kerusuhan. Pemira merupakan kegiatan yang rawan akan terjadinya keributan, baik secara administrasi maupun kekerasan fisik. Dalam hal mencegah terjadinya keributan dan menghindari sesuatu hal yang tidak diinginkan, satpam dan polisi berperan penting untuk mengawal jalannya Pemira.

Penekanan pada segi keamanan juga dipaparkan oleh saudara Yusuf dan Hanif. Yusuf menyatakan bahwa:

Segi keamanan lebih ditekankan karena tahun sebelumnya hanya melibatkan menwa. Sedangkan untuk tahun 2015 KPUR melibatkan satpam dan Polsek Gayungan. Jadi semua terlibat, dari luar KPUR mendapat backingan dari satpam dan polisi, sedangkan dari dalam intra KPUR sendiri mendapat backingan dari dekan dan pembantu dekan. (wawancara 17 Juni 2016)

Pada Pemira FIS Tahun 2015, semua pihak dikerahkan baik dari KPUR, Panwas, birokrasi fakultas, satpam, sampai pihak kepolisian. Pelibatan semua lini tidak semata-mata untuk meramaikan Pemira melainkan sebagai tindakan pencegahan terhadap konflik agar kejadian tahun sebelumnya yaitu 2014 dan 2013 tidak terulang kembali. Tahun 2014 hanya melibatkan menwa yang statusnya adalah mahasiswa sehingga apabila terjadi kerusuhan besar tidak mampu menghentikannya. Dengan melibatkan semua pihak, otomatis KPUR menjadi kuat karena dari dalam mendapat backingan dari fakultas yaitu

pembantu dekan dan dari luar ada satpam beserta polisi Gayungan. Segi keamanan juga dipaparkan oleh saudara Hanif yang tidak jauh berbeda dari saudara Yusuf, yang berpendapat bahwa:

Komunikasi dilakukan terhadap satpam dan polisi. Satpam bertugas dengan siaga selama Pemira berlangsung. Pihak kepolisian dilibatkan saat Pemira maupun penghitungan suara. (wawancara 6 Juni 2016)

Dari pernyataan Hanif di atas dapat diketahui bahwa komunikasi penting dilakukan dalam suatu kerjasama demi tercapainya tujuan organisasi. Oleh karena itu, KPUR dalam menyelenggarakan Pemira bekerjasama dengan satpam dan kepolisian. Satpam dan polisi dilibatkan sebagai pihak yang berwenang dan mampu mengamankan kegiatan Pemira. Pengamanan dilakukan selama pemilihan berlangsung sampai selesainya penghitungan suara. Meskipun sudah ada bagian keamanan yaitu satpam dan polisi, pada awal pembukaan Pemira terjadi sedikit masalah yang menyebabkan keterlambatan dalam membuka Pemira.

Keterlambatan dalam membuka Pemira merupakan suatu masalah yang disebabkan oleh perbedaan jumlah DPT menurut saudara Yusuf. Selengkapnya Yusuf berpendapat bahwa:

Terdapat sedikit kendala terkait perbedaan jumlah DPT yang membuat pembukaan Pemira molor. Akhirnya muncul solusi dan disitu sudah ada ketua KPU fakultas, pihak dekanat dan satpam yang handle masalah tersebut sehingga Pemira dapat segera dibuka. (wawancara 17 Juni 2016)

Pernyataan di atas menjelaskan bahwa terjadi sedikit masalah yang dapat menghambat jalannya pembukaan Pemira. Masalah yang terjadi adalah adanya perbedaan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada saat Pemira. Jumlah DPT antara pihak KPUR Fakultas dengan KPUR prodi Administrasi Negara (AN) tidak sama sehingga menyebabkan pembukaan Pemira menjadi terlambat atau molor beberapa menit. Masalah perbedaan jumlah DPT tersebut akhirnya dapat di atasi dengan adanya solusi dari KPUR Fakultas dan pihak dekanat, serta satpam yang terus bersiaga di sekitar area TPS sehingga Pemira segera dibuka.

*Ketiga*, pengamanan ekstra terhadap kotak suara. Agenda berikutnya setelah Pemira atau pemungutan suara adalah penghitungan suara. Sebelum dilaksanakannya penghitungan surat surat suara, terlebih dahulu dilakukan pengamanan terhadap kotak suara. Hal ini bertujuan untuk mengantisipasi adanya konflik baik internal maupun eksternal dan menghindari adanya manipulasi terhadap kotak suara. Dalam hal ini pihak keamanan diperlukan untuk mengawal penuh proses penghitungan suara,

sebagaimana pemaparan saudara Fajar yang menyatakan bahwa:

Pihak satpam dan kepolisian ditugaskan untuk mengawal secara penuh pemilihan dan pemungutan suara, sehingga pihak keamanan harus selalu ada pada setiap posisi. (wawancara 4 Juni 2016)

Berdasarkan pernyataan tersebut, dijelaskan bahwa pihak keamanan yaitu satpam dan polisi bertugas untuk mengawal secara penuh selama pemilihan dan pemungutan suara berlangsung. Pengawasan secara penuh maksudnya adalah pihak keamanan siap siaga di sekitar area TPS mulai dari pembukaan Pemira sampai selesainya pemilihan, penyimpanan pada kotak suara dan ketika penghitungan dilakukan. Dengan demikian pihak keamanan harus selalu ada di setiap posisi, baik di area TPS maupun di dalam gedung I8 pada saat penghitungan suara.

Berkaitan dengan kotak suara, KPUR melakukan pengamanan kotak suara yang berbeda dari Pemira FIS tahun 2014. Pengamanan kotak suara merupakan strategi yang dirancang untuk mengantisipasi adanya kerusakan terhadap kotak suara. Pengamanan terhadap kotak suara dilakukan dengan melibatkan pihak kepolisian yakni Polsek Gayungan, yang mana Budi menyatakan bahwa:

Kotak suara diamankan betul setelah pemilihan dan khususnya untuk kotak suara BEM fakultas langsung dibawa ke kepolisian. Kotak suara BEM fakultas langsung diangkat dengan kendaraan polisi untuk dibawa ke Polsek Gayungan. (wawancara 9 Juni 2016)

Pernyataan yang sama juga dikemukakan oleh saudara Fajar yang mana dapat memperkuat jawaban dari saudara Budi. Kotak suara diamankan ke pihak kepolisian dengan melibatkan semua pihak terkait. Berikut pernyataan dari Fajar yang menyatakan bahwa:

Kotak suara kita amankan ke Polsek Gayungan. Penyimpanan kotak suara ke Polsek Gayungan melibatkan panwaslu, saksi calon, serta timses. Mulai dari penyegelan, pengangkutan ke kendaraan dan penyimpanan ke Polsek dikawal oleh semua pihak. (wawancara 4 Juni 2016)

Berdasarkan pernyataan dari Fajar tersebut dapat dijelaskan bahwa strategi pengamanannya adalah kotak suara diamankan oleh KPUR FIS ke Polsek Gayungan. Hal ini bertujuan untuk menghindari kerusakan dan manipulasi terhadap kotak suara. Pengamanan kotak suara dilakukan secara terbuka dan semua pihak yang terkait seperti panwaslu, saksi dari masing-masing calon dan timses dapat melakukan pengawasan secara langsung. Pengawasan dimulai dari penyegelan kotak suara, pemindahan kotak suara dari Tempat Pemungutan Suara

(TPS) ke kendaraan polisi sampai menuju Polsek Gayungan untuk disimpan.

Pengamanan terhadap kotak suara juga telah diatur oleh KPUR dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Raya Fakultas Ilmu Sosial Nomor 4 Tahun 2015 tentang Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara BEM dan DPM FIS angka 3 poin d dan e. Bunyi angka 3 poin d adalah sebagai berikut:

Setelah pemungutan suara masing-masing prodi ditutup, kotak suara BEM FIS dan DPM FIS akan disegel oleh KPUR FIS, PANWAS FIS, saksi dari masing-masing pasangan calon ketua dan wakil BEM FIS dan saksi dari masing-masing calon DPM FIS.

Kemudian bunyi dari angka 3 poin e dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Raya Fakultas Ilmu Sosial Nomor 4 Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

Kotak suara akan disegel oleh KPUR FIS serta dibawa dan disimpan di kantor Polsek Gayungan.

Berdasarkan bunyi dari surat Keputusan KPUR FIS Nomor 4 Tahun 2015 angka 3 poin d dan e telah ditetapkan bahwa teknis pengamanan kotak suara adalah dengan cara disegel oleh KPUR FIS Unesa tahun 2015. Setelah dilakukan penyegelan, kotak suara kemudian diamankan di kantor Polsek Gayungan, Surabaya dengan pengawasan ketat dari polisi setempat, KPUR dan Panwas FIS tahun 2015 serta saksi masing-masing calon.

*Keempat*, penghitungan suara secara terbatas. Agenda berikutnya setelah Pemira atau pemungutan suara adalah penghitungan suara. Penghitungan suara merupakan agenda yang ditunggu-tunggu dalam serangkaian kegiatan Pemira karena dapat diketahui perolehan suara dari masing-masing calon. Dalam penghitungan suara juga rawan terjadinya konflik maupun keributan yang dapat menghentikan jalannya kegiatan. Oleh karena itu, strategi yang digunakan adalah pada teknis penghitungan suara. Hal ini bertujuan untuk mengantisipasi adanya keributan selama penghitungan suara berlangsung.

Pada Pemira FIS tahun 2015, penghitungan suara dilaksanakan sehari setelah pemungutan suara. Dalam penghitungan suara telah ditetapkan sebelumnya bahwa akan dilakukan di waktu dan tempat yang berbeda dari pemungutan suara. Ketetapan ini merupakan suatu strategi yang digunakan oleh KPUR untuk mengantisipasi terjadinya konflik, sebagaimana yang diungkapkan oleh Fajar bahwa:

Sesuai dengan strategi yang ada di awal, penghitungan suara dilakukan di gedung I8 untuk meminimalisir konflik. Penghitungan suara dilakukan 1 (satu) hari setelah pemungutan suara. (wawancara 4 Juni 2016)

Berdasarkan pernyataan di atas, diketahui bahwa pada Pemira FIS tahun 2015, penghitungan suara dilakukan di dalam gedung I8 dan waktunya adalah 1 (satu) hari setelah pemungutan suara. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk meminimalisir konflik. Tujuan untuk meminimalisir konflik maksudnya adalah semaksimal mungkin KPUR berusaha menghindari dan mengurangi konflik agar tidak ada korban seperti Pemira FIS tahun 2014. Keputusan terkait teknis penghitungan suara diungkapkan oleh Fajar bahwa:

Berkaca dari tahun-tahun sebelumnya penghitungan suara ditempat terbuka atau ramai berpotensi pada kericuhan yang cukup besar. Jadi, KPUR fakultas memutuskan penghitungan suara dilakukan di gedung I8. (wawancara 4 Juni 2016)

Berdasarkan pada pengalaman Pemira FIS Tahun 2014 yang telah terjadi kericuhan ketika penghitungan suara, KPUR memutuskan bahwa penghitungan suara dilakukan di dalam gedung. Alasan mendasar terkait tempat penghitungan suara adalah karena jika dilakukan di tempat terbuka akan menimbulkan kericuhan yang besar. Oleh karena itu, KPUR FIS memutuskan bahwa penghitungan suara dilaksanakan di dalam gedung yaitu di I8 sehingga tidak semua mahasiswa FIS dapat masuk untuk menyaksikan jalannya penghitungan suara. Keputusan tersebut juga atas dasar saran dari Pembantu Dekan (PD) 3, seperti pernyataan saudara Budi yang menyatakan bahwa:

PD 3 menyarankan untuk fakultas diseterilkan di ruang fakultas sendiri yaitu di gedung I8 untuk penghitungan suara. (wawancara 9 Juni 2016)

Menurut Budi, PD 3 telah menyarankan untuk menyeterilkan penghitungan suara dengan dilakukan di ruang I8. Dengan adanya penghitungan suara yang dilaksanakan di dalam ruang atau gedung I8, sudah dipastikan bahwa tidak semua orang atau mahasiswa dapat masuk kedalam untuk melihat jalannya acara. Dengan kapasitas ruang yang terbatas, KPUR membatasi pihak-pihak tertentu saja yang dapat masuk kedalam gedung I8, seperti pernyataan Fajar yang menyatakan bahwa:

KPUR fakultas memutuskan penghitungan dilakukan di gedung I8. Terdapat pembatasan bagi yang dapat masuk I8, yang dapat masuk hanya masing-masing timses calon dan 1 (satu) pendukung. Jadi tidak semuanya bisa masuk menyaksikan penghitungan suara di I8. (wawancara 4 Juni 2016)

Selain melakukan pembatasan dalam penghitungan suara, pihak KPUR juga memberikan fasilitas kepada para pendukung calon atau mahasiswa lain untuk

mengikuti proses penghitungan. Fasilitas yang diberikan adalah dengan mengizinkan para pendukung masing-masing calon untuk menunggu di luar gedung I8 dan memantau proses penghitungan dari luar. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan dari Fajar yang berkata bahwa:

Ketika ada pendukung lain yang ingin melihat hasil penghitungan suara, pihak KPUR memfasilitasi untuk menunggu di luar gedung I8. Jadi para pendukung masing-masing calon bisa memantau jalannya penghitungan suara dari luar gedung I8. (wawancara 4 Juni 2016)

Strategi terkait teknis penghitungan suara yaitu dengan dilakukannya secara terbatas telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Raya Fakultas Ilmu Sosial Nomor 4 Tahun 2015 tentang Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara BEM dan DPM FIS pada angka 4 poin b dan d. Surat Keputusan KPUR FIS Nomor 4 Tahun 2015 angka 4 poin b berbunyi:

Penghitungan suara BEM dan DPM FIS dilakukan oleh satu perwakilan PPSJ/P dari setiap prodi dan bertempat di Gedung I8, apabila salah satu perwakilan PPSJ/P tidak hadir dalam penghitungan, maka akan dibantu oleh KPUR FIS.

Bunyi dari angka 4 poin b tersebut menunjukkan bahwa penghitungan suara dilakukan di gedung I8 FIS Unesa. Sedangkan Surat Keputusan KPUR FIS Nomor 4 Tahun 2015 angka 4 poin d berbunyi:

Diperbolehkan memasuki ruangan penghitungan surat suara ialah masing-masing pasangan calon ketua dan wakil ketua BEM FIS serta saksi dari masing-masing calon ketua dan wakil ketua BEM FIS, saksi dari masing-masing calon DPM FIS serta calon DPM FIS, PANWAS FIS, dan KPUR FIS, salah satu perwakilan PPS setiap prodi, pembina ormawa semua prodi beserta pembina ormawa FIS dan juga keamanan.

Berdasarkan bunyi dari Surat Keputusan KPUR FIS Nomor 4 Tahun 2015 angka 4 poin d diketahui bahwa yang dapat memasuki ruang I8 untuk mengikuti jalannya penghitungan suara adalah pasangan calon, saksi dari masing-masing calon, Panwas dan KPUR FIS, perwakilan PPS setiap prodi, pembina Ormawa, serta pihak keamanan. Dengan demikian, penghitungan suara pada Pemira FIS Tahun 2015 dilakukan secara terbatas karena hanya pihak-pihak tertentu saja yang dapat masuk ke dalam ruang I8.

Berdasarkan pernyataan dari beberapa narasumber dan Surat Keputusan KPUR FIS Nomor 4 Tahun 2015 dapat diketahui bahwa strategi yang digunakan oleh KPUR FIS dalam penyelenggaraan Pemira FIS tahun 2015 adalah dengan melakukan pengamanan terhadap

kotak suara dan penghitungan suara terbatas yaitu dilakukan sehari setelah Pemira di gedung I8. Pengamanan kotak suara dilakukan dengan cara penyegelan dan diamankan di Polsek Gayungan. Penghitungan suara dilakukan terbatas di gedung I8 sehari setelah pemungutan suara sehingga bagi pendukung yang tidak dapat masuk ke ruang I8 dapat menunggu hasil penghitungan dan melihatnya dari luar gedung I8.

### **Pembahasan**

Pemilihan Umum Raya (Pemira) FIS UNESA Tahun 2015 dilaksanakan secara serentak telah disepakati oleh setiap pihak, baik dari fakultas, KPUR FIS dan KPUR jurusan/prodi. Pemira dilakukan secara serentak dengan tujuan untuk meminimalisir konflik, mempersingkat waktu (efisien), dan menghemat anggaran atau biaya operasional. Keputusan serentak didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang matang dan berkaca pada pengalaman Pemira tahun 2014 dan 2013 karena telah terjadi keributan yang menyebabkan korban jiwa.

Dengan dilaksanakannya Pemira secara serentak, diharapkan dapat mengurangi terjadinya konflik karena semua Pemira di lingkup FIS akan terakomodir sehingga fokus dari pendukung masing-masing calon akan terpecah. Pemira serentak berarti pemilihan BEM, DPM maupun HMJ/HMP dilakukan dalam satu waktu di hari yang sama sehingga tidak terpisah seperti tahun-tahun sebelumnya (2014 dan 2013).

Sedangkan dalam hal biaya, dengan diadakannya pemira secara serentak dapat menghemat anggaran dana karena ketika dilakukan dalam satu waktu, kebutuhan yang dibutuhkan Pemira tidak terlalu banyak. Misalnya, dalam penyewaan perlengkapan pihak KPUR hanya menyewa satu hari saja sehingga biaya yang dikeluarkan tidak banyak. Berbeda dengan pemira secara terpisah, penyewaan perlengkapan dilakukan beberapa hari sehingga biaya yang dibutuhkan relatif banyak.

Tujuan dari pemira serentak adalah untuk meminimalisir konflik, akan tetapi tidak menutup kemungkinan terjadi konflik yang lebih kompleks dan besar. Pertimbangannya adalah pada Pemira 2014 dan 2013 yang dilaksanakan secara terpisah terdapat keributan yang membuat ramai FIS yang berujung pada pihak kepolisian, lalu bagaimana dengan Pemira serentak yang pesta demokrasi mahasiswa dari berbagai jurusan di FIS dilaksanakan di hari yang sama? Dengan diadakannya Pemira secara serentak kemungkinan terjadinya konflik sangat besar karena mahasiswa FIS dari berbagai golongan dan kepentingan berbaur menjadi satu di waktu yang sama.

Namun, pada kenyataannya di hari H Pemira berlangsung mulai dari awal pembukaan, selesainya

penghitungan suara, sampai penetapan pemenang Pemira FIS tahun 2015 berjalan lancar dan sukses meskipun masih terdapat sedikit konflik tetapi bisa segera teratasi. Kelancaran Pemira FIS tahun 2015 tidak luput dari segala perencanaan dan strategi yang matang dan peran serta berbagai pihak, baik dari KPUR FIS, KPUR Prodi/Jurusan, birokrasi fakultas, dan mahasiswa FIS.

Pada Pemira FIS tahun 2015 yang diselenggarakan secara serentak sudah sesuai harapan dari pihak-pihak yang terkait seperti KPUR, fakultas dan para mahasiswa FIS. Dalam suatu kegiatan pasti terdapat kendala ataupun masalah yang dihadapi. Begitu juga dengan terselenggaranya Pemira, dalam proses pencapaian tujuan dan harapan terdapat masalah dalam penerapan mekanisme. Melalui koordinasi dengan berbagai pihak akhirnya masalah-masalah yang ada dapat segera teratasi.

Pemira FIS Tahun 2015 yang diadakan secara serentak berpotensi menimbulkan konflik yang lebih besar karena ruang lingkup pemilihan lebih luas dan waktu yang dibutuhkan cukup singkat. KPUR dalam mempersiapkan Pemira memiliki strategi-strategi yang dianggap dapat memperlancar jalannya Pemira sesuai tujuan yang diharapkan dan untuk mengantisipasi adanya keributan. Strategi yang ditetapkan telah dipikirkan matang-matang dan telah melalui kesepakatan diantara internal KPUR.

KPUR FIS dalam menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara Pemira memiliki strategi-strategi yang digunakan untuk mewujudkan tujuan Pemira itu sendiri. Dari hasil penelitian yang telah dijelaskan, diketahui bahwa strategi yang digunakan KPUR FIS dalam menyelenggarakan Pemira terdiri dari 3 (tiga) tahap. Tahapan strategi meliputi strategi sebelum, selama berlangsung, dan setelah Pemira.

Strategi sebelum Pemira artinya cara yang dirancang dan ditetapkan KPUR selama proses persiapan untuk menyiapkan segala kebutuhan sebelum dilaksanakan pemungutan suara atau Pemira. Strategi selama Pemira adalah strategi yang telah dirancang untuk digunakan ketika pemungutan suara atau pemilihan umum berlangsung. Sedangkan setelah Pemira adalah strategi yang telah ditetapkan sebelumnya untuk digunakan setelah selesainya pemilihan sampai proses penghitungan suara.

Berbicara tentang strategi sendiri, ada 2 (dua) model strategi yaitu menurut Wechsler dan Backoff (model W-B) dan model Rubin. Model Wechsler dan Backoff (model W-B) memiliki 4 (empat) jenis strategi yang meliputi strategi pengembangan, transformasi, protektif, dan politik. Sedangkan menurut model Rubin juga terdapat 4 (empat) jenis strategi yang meliputi strategi saga (SS), strategi quest (SQ), strategi venture (SV), dan strategi parlay (SP).

Berdasarkan model strategi W-B, strategi yang digunakan oleh KPUR FIS adalah strategi protektif. Strategi protektif merupakan strategi yang dirancang karena adanya potensi ancaman yang berasal dari lingkungan luar organisasi dan kapasitas organisasi yang dimiliki terbatas. Strategi yang dibuat KPUR FIS karena adanya potensi ancaman dari luar berupa keributan oleh pendukung masing-masing calon baik sebelum Pemira maupun ketika hari H.

KPUR FIS juga memiliki kapasitas organisasi terbatas. Kapasitas terbatasnya adalah dari segi jumlah anggota, KPUR FIS memiliki 7 anggota dan dari segi waktu penyelenggaraan Pemira, KPUR FIS hanya memiliki waktu sekitar 1 minggu terhitung mulai terbentuknya KPUR sampai hari H Pemira. Dengan demikian, KPUR melibatkan pihak fakultas dan pihak keamanan (satpam dan kepolisian) sebagai pihak yang membentengi (*backing*) jalannya pemira di luar KPUR FIS sendiri.

Guna meningkatkan hubungan baik diantara semua pihak, KPUR FIS melakukan komunikasi secara intens. Komunikasi yang dilakukan yaitu dengan berkoordinasi terkait jalannya Pemira terhadap semua lini, baik secara "*top down*" maupun "*down top*". *Top down* artinya komunikasi antara KPUR FIS dengan KPUR jurusan/prodi, sedangkan *down top* artinya komunikasi dengan pihak fakultas (dekan dan pembantu dekan). Dari segi keamanan, sebagai langkah protektif adalah menekankan pada keamanan yaitu berkoordinasi dengan pihak satpam dan kepolisian, disini adalah Polsek Gayungan. Satpam dan polisi bertugas untuk mengawal penuh selama Pemira berlangsung sampai penghitungan suara.

Tindakan protektif dalam pengawalan terlihat dari adanya satpam yang bersiaga pada saat berlangsungnya Pemira dan adanya pengamanan kotak suara ke Polsek Gayungan menggunakan kendaraan polisi. Selain itu, penggunaan ruang untuk penghitungan suara merupakan langkah protektif karena dengan dilakukan di dalam ruang secara otomatis tidak semua mahasiswa dapat masuk kedalam sehingga pengamanan lebih terkendali. KPUR membatasi siapa saja yang masuk kedalam ruang I8, hanya pihak-pihak tertentu yang ada di dalam seperti KPUR sendiri, panwaslu, para calon, saksi dan satu timses masing-masing calon, pihak fakultas dan keamanan.

Berdasarkan strategi model Rubin, strategi yang digunakan KPUR FIS merupakan strategi venture (SV). Strategi venture (SV) digunakan untuk menjelaskan orientasi strategi yang memiliki dimensi waktu pendek dan berfokus memanfaatkan peluang yang tersedia dan menghindari munculnya ancaman yang seketika itu perlu mendapatkan tanggapan strategis. Strategi yang

dilakukan KPUR FIS masuk ke dalam jenis strategi venture.

Dimensi waktu pendek disini adalah waktu yang dimiliki singkat, yang mana KPUR FIS memiliki waktu terbatas sekitar 1 (satu) minggu untuk menyiapkan segala sesuatu dalam menyelenggarakan Pemira. Dengan waktu yang terbatas dan cukup pendek KPUR FIS harus dapat membuat ketetapan-ketetapan yang dapat mengantisipasi apabila terjadi konflik dan harus bisa memanfaatkannya untuk menghindari keributan. KPUR FIS harus dapat berkomunikasi dengan semua pihak secara baik agar tidak terjadi kesalahpahaman.

Ketetapan-ketetapan KPUR meliputi serangkaian agenda Pemira mulai dari waktu pendaftaran calon sampai penghitungan suara, peraturan pendaftaran dan kampanye, teknis pelaksanaan Pemira, penghitungan suara sampai penetapan calon pemenang (ketua dan wakil ketua BEM FIS serta DPM). Melalui ketetapan tersebut dapat dijadikan oleh KPUR sebagai cara untuk menghindari terjadinya konflik. Meskipun dalam waktu singkat, KPUR telah memutuskan ketetapan-ketetapan secara matang agar tidak ada celah bagi para oknum/pihak luar yang ingin menggagalkan jalannya Pemira, baik selama persiapan maupun setelah berlangsungnya Pemira.

Dalam ketetapan tersebut juga memuat aturan-aturan yang digunakan sebagai alat untuk bertindak apabila terjadi gugatan atau protes. Sebagaimana diatur dalam Keputusan KPUR FIS Nomor 4 Tahun 2015 pasal 5 poin c tentang teknis pemungutan dan penghitungan suara BEM dan DPM FIS terkait penetapan. Kemudian, hasil dari ketetapan-ketetapan tersebut telah terlampir dalam lampiran berkas acara mulai dari keputusan KPUR FIS Nomor 1 sampai Nomor 10 Tahun 2015.

Kemudian jika ditinjau dari teori organisasi, terdapat beberapa pendekatan yang digunakan untuk mengetahui perkembangan suatu organisasi. Pendekatan-pendekatan organisasi tersebut diantaranya pendekatan klasik, tingkah laku, struktur, dan sistem.

Berdasarkan keempat pendekatan tersebut, pendekatan yang sesuai dengan organisasi KPUR FIS UNESA adalah pendekatan sistem yang mana lebih menekankan pada sistem terbuka yang harus berinteraksi dengan lingkungannya. Sebagaimana sistem terbuka, KPUR FIS harus dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Selain menyesuaikan diri dengan lingkungannya, sesuai sistem terbuka KPUR FIS juga berinteraksi secara internal maupun eksternal. Interaksi internal adalah interaksi antara anggota di dalam KPUR FIS. Interaksi eksternal adalah interaksi antara KPUR FIS dengan pihak fakultas dengan KPUR jurusan/prodi, maupun dengan pendukung setiap calon.

Di samping pendekatan-pendekatan organisasi, di dalam organisasi juga terdapat perilaku organisasi yang meliputi pengambilan keputusan dan komunikasi. Perilaku organisasi sendiri adalah perilaku individu-individu di dalam organisasi yang mempengaruhi perkembangan organisasi. Perilaku organisasi digunakan untuk mencapai tujuan organisasi. Perilaku KPUR FIS Tahun 2015 adalah perilaku-perilaku masing-masing individu di dalam organisasi tersebut, mulai dari cara berpendapat, berkomunikasi, hingga dalam mengambil keputusan. Dengan demikian, perilaku-perilaku diantara anggota KPUR FIS Tahun 2015 secara umum merupakan gambaran dari perilaku organisasi KPUR FIS.

Komunikasi sendiri diartikan sebagai proses penyampaian pesan dari satu sumber berita kepada penerima melalui saluran tertentu dengan tujuan untuk mendapatkan tanggapan dari penerima (Umar, 2009:37). Berdasar pengertian tersebut, selama proses penyelenggaraan Pemira terjadi penyampaian informasi dari KPUR FIS Tahun 2015 kepada mahasiswa FIS terkait agenda Pemira. Tujuannya adalah untuk mendapatkan balasan berupa partisipasi politik mahasiswa, baik sebagai calon, pendukung, maupun pemilih.

Dalam lingkup organisasi, komunikasi terbagi menjadi 2 (dua) yaitu komunikasi intern dan ekstern. Berdasarkan pembagian tersebut, KPUR FIS UNESA melakukan 2 (dua) komunikasi sekaligus, yaitu intern dan ekstern. Komunikasi intern dilakukan diantara anggota KPUR FIS sendiri. Komunikasi intern ditunjukkan dengan interaksi ketika anggota berkumpul, melakukan musyawarah dan saling menguatkan diantara internal KPUR. Sedangkan komunikasi ekstern dilakukan antara KPUR FIS dengan pihak luar organisasi, yaitu pihak fakultas (dekan dan pembantu dekan), mahasiswa (baik calon, timses, pendukung, maupun pemilih), dan pihak keamanan (satpam dan kepolisian).

Selain dari segi komunikasi, perilaku organisasi juga terlihat dari pengambilan keputusan. Menurut Koonyz dan Wehrich (1990:108), pengambilan keputusan didefinisikan sebagai penataan pilihan langkah atau tindakan dari sejumlah alternatif. Pengambilan keputusan berkaitan dengan pemecahan masalah. Pengambilan keputusan suatu organisasi dapat dilakukan melalui musyawarah, voting, lobbying, maupun keputusan sendiri oleh Ketua. KPUR FIS dalam menyelenggarakan Pemira telah membuat ketetapan-ketetapan sebagai strateginya untuk mengantisipasi konflik. Pembuatan ketetapan-ketetapan tersebut melalui rapat pleno yang dihadiri oleh semua anggota. Pengambilan keputusan yang dilakukan untuk menghasilkan ketetapan adalah dengan musyawarah dan voting.

## **PENUTUP**

### **Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa Pemilihan Umum Raya (Pemira) FIS UNESA tahun 2015 berjalan lancar dan sukses dengan beberapa strategi. Strategi yang digunakan oleh Komisi Pemilihan Umum Raya (KPUR) FIS UNESA Tahun 2015 dalam penyelenggaraan Pemira FIS secara serentak diantaranya adalah ketetapan-ketetapan dalam Pemira, memperketat keamanan selama Pemira berlangsung, pengamanan ekstra terhadap kotak suara, serta penghitungan suara secara terbatas.

Ketetapan-ketetapan dalam Pemira digunakan sebagai aturan/acuan dalam penyelenggaraan Pemira FIS Tahun 2015 dan untuk mengantisipasi apabila terjadi konflik atau gugatan agar terhindar dari kesalahpahaman. Pembuatan ketetapan dilakukan dengan jalan musyawarah dan voting melalui rapat pleno anggota KPUR FIS Tahun 2015. Ketetapan-ketetapan berisi penetapan struktur KPUR FIS Unesa Tahun 2015, agenda Pemira FIS Unesa Tahun 2015, teknis Pemira (persyaratan bakal calon, verifikasi data bakal calon, pengumuman hasil calon, teknis kampanye, teknis pemungutan suara dan hasil perolehan suara).

Pada Pemira FIS 2015 tingkat keamanan lebih diperketat baik dari dalam maupun dari luar fakultas. Pihak fakultas seperti dekan dan pembantu dekan ikut andil mulai dari persiapan hingga selesainya Pemira. Pada saat hari H Pemira, pihak fakultas terjun langsung ke lapangan untuk mengawal Pemira sehingga KPUR FIS memiliki perlindungan dari dalam. Pada Pemira 2015 juga melibatkan satpam dan kepolisian, yaitu dari Polsek Gayungan untuk mengawal penuh berlangsungnya Pemira.

Pengamanan terhadap kotak suara dilakukan dengan disegel terlebih dahulu oleh KPUR FIS kemudian disimpan dan diamankan ke Polsek Gayungan menggunakan kendaraan polisi. Pengamanan kotak suara menuju ke Polsek Gayungan dikawal oleh KPUR, Panwas, dan timses masing-masing calon.

Penghitungan suara dilakukan secara terbatas di dalam ruang/gedung I8 FIS UNESA. Terbatas disini maksudnya adalah tidak semua mahasiswa dapat memasuki ruangan, tetapi hanya pihak-pihak tertentu saja seperti KPUR, panwaslu, para calon, satu saksi dan timses dari masing-masing calon, pihak fakultas, serta pihak keamanan.

### **Saran**

Berdasarkan temuan yang diperoleh dari penelitian, terdapat beberapa saran dan masukan terkait Pemira, baik dari segi teknis dan logistik. Diperlukan perencanaan yang matang dan pembentukan KPUR FIS jauh-jauh hari,

minimal 2 minggu sebelum Pemira. Hal ini dimaksudkan agar KPUR FIS yang telah terbentuk memiliki waktu cukup lama untuk mempersiapkan Pemira sehingga rencana strateginya akan jauh lebih matang. Mengingat anggota KPUR FIS adalah mahasiswa yang tidak saja fokus pada Pemira tetapi juga pada kegiatan kuliah maka alangkah lebih baik jika jangka waktu pembentukan KPUR FIS dengan Pemira cukup lama.

Berdasarkan pada penelitian, perlu diperhatikan pada logistik Pemira yang berupa dana dan fasilitas KPUR FIS UNESA. Logistik dalam suatu kegiatan sangat dibutuhkan dan merupakan faktor penting suksesnya acara. Apabila logistik dan fasilitas yang diberikan jauh dari kata cukup, maka anggota KPUR FIS akan kebingungan untuk mendapatkannya sehingga fokusnya akan terpecah. Dengan demikian perlu diperhatikan lagi dalam pemberian logistik, karena harus benar-benar sesuai dengan kebutuhan Pemira.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Creswell, John W. 2013. *Research Design*. Jakarta: Pustaka Pelajar
- Hasibuan, Malayu S.P. 2007. *Organisasi & Motivasi*. Bandung: Bumi Aksara
- Iriantara, Yosol. 2003. *Manajemen Strategis Public Relations*. GI
- Kurniawan, Agung. 2009. *Transformasi Birokrasi*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- Muhammad, Arni. 1995. *Komunikasi Organisasi*. Jakarta: Bumi Aksara
- Muhammad, Suwarsono. *Strategi Pemerintahan*. Jakarta: Erlangga
- Muis, Salahudin. 2007. *Pemikiran Teori Organisasi dan Manajemen antara SUN TZU & KINI*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Nawawi, Hadari. 2003. *Manajemen Strategik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Nimran, Umar. 2009. *Perilaku Organisasi*. Malang: Laros
- Poloma, Margaret M. 2004. *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers
- Rais, Soenyoto. 1994. *Pengelolaan Organisasi*. Surabaya: Airlangga University Press
- Ritzer, George. 2008. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Kencana
- Rudy, May. 2003. *Pengantar Ilmu Politik (wawasan pemikiran dan kegunaannya)*. Bandung: Refika
- Sinambela, Lijan Poltak. 2006. *Reformasi Pelayanan Publik*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Soekanto, Soerjono. 2010. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers
- Sugiyono. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta